

BAB IV

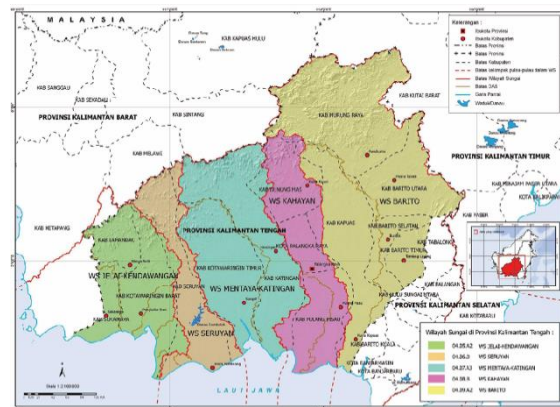
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan wilayah dengan luas sebesar 153.564,5 km² dengan dibatasi oleh wilayah tertentu di Pulau Kalimantan dan dihuni oleh 2,84 juta jiwa per tahun 2025. Secara geografis, provinsi ini berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur di sebelah utara, adapun di bagian timur berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, bagian selatan berbatasan dengan Laut Jawa, serta di bagian barat berbatasan dengan Kalimantan Barat.

Gambar 4.1. Peta Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber: DPMPTSP Kalimantan Tengah, 2024

Sebelum adanya pemekaran pada tahun 1998, kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas, Kabupaten

Kotawaringin Barat dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Namun, setelah adanya pemekaran sejak tahun 1999, Kalimantan Tengah kemudian memiliki 14 kabupaten/kota dengan tambahan Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan (Badan Pusat Statistik, 2025).

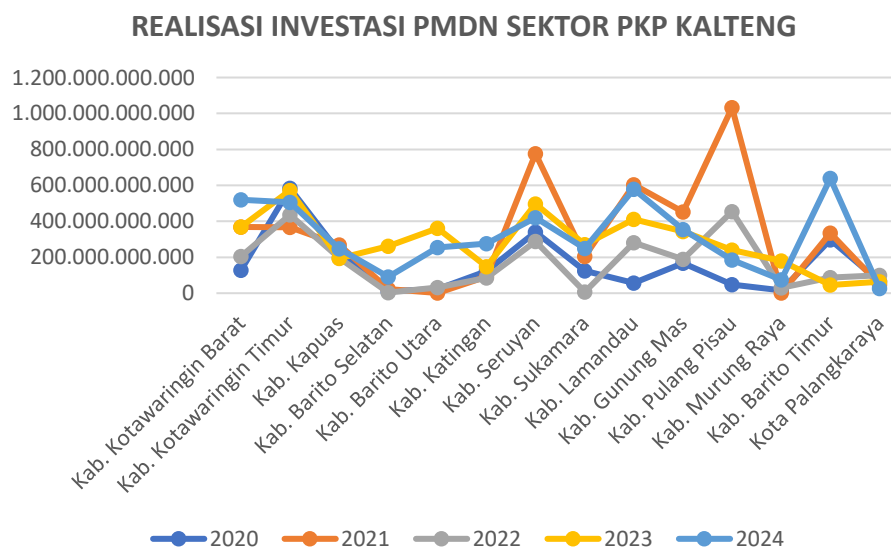
Adapun struktur ekonomi di Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha dikutip dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Tengah (2024) didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (PKP), industri pengolahan, serta pertambangan dan penggalian. Ketiga lapangan usaha ini sejatinya memberikan 49,86% terhadap perekonomian di Kalimantan Tengah, yang mana 21,50% diantaranya dipegang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini tentu tidak mengherankan, mengingat 80% wilayah di Kalimantan Tengah didominasi oleh hutan. Lahan yang luas itu saat ini hanya menyisakan 25% hutan primer dan sisanya telah dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit, karet, dan rotan yang hampir tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Kotawaringin Timur. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dominan ini kemudian tergambarkan dalam PDRB Kalimantan Tengah berdasarkan harga konstan 2020 – 2024 sebagaimana di bawah ini.

Tabel 4.1. Perkembangan PDRB Sektor PKP dan PDRB**Kalimantan Tengah 2020 – 2024**

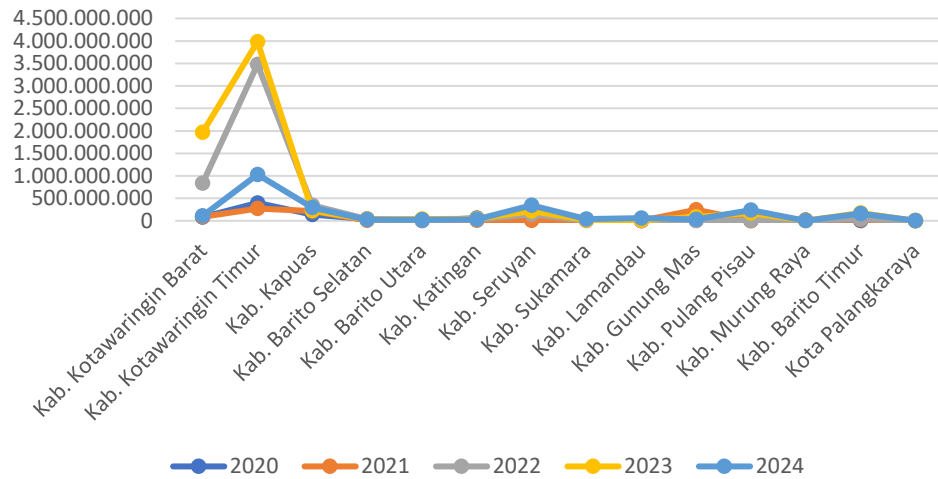
Tahun	PDRB Sektor PKP (juta Rp)	PDRB Kalimantan Tengah (juta Rp)	Kontribusi
2020	21.304.920	98.933.610	21,53%
2021	22.073.160	102.481.500	21,53%
2022	22.834.250	109.094.700	20,93%
2023	23.837.490	113.611.500	20,98%
2024	24.148.440	118.682.320	20,34%

Sumber: BPS Kalimantan Tengah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.1, secara kontribusi sektor PKP mengalami penurunan meskipun tidak terlalu tajam. Hal serupa terjadi pada periode 2016 – 2020 yang mana terjadi fluktuasi kontribusi disebabkan oleh minimnya tunjangan infrastruktur dan teknologi pertanian sehingga membuat hasil produksi menurun, serta diakibatkan oleh adanya larangan pembukaan lahan dengan pembakaran. Namun, secara nominal PDRB pada sektor PKP menunjukkan peningkatan angka setiap tahunnya. Peningkatan ini juga didukung oleh masuknya investasi yang terjadi secara masif.

Gambar 4.2. Tren Kenaikan Investasi PMDN dan PMA Sektor**PKP di Kalimantan Tengah 2020 – 2024**

REALISASI INVESTASI PMA SEKTOR PKP KALTENG



Sumber: DPMPTSP Kalimantan Tengah, 2025

Berdasarkan kedua grafik di atas, terlihat adanya dinamika fluktuasi yang tinggi pada investasi sektor PKP antar kabupaten/kota di Kalimantan Tengah selama periode 2020–2024. Grafik PMDN memperlihatkan bahwa beberapa wilayah memiliki kontribusi yang lebih stabil dan relatif tinggi seperti Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, dan Murung Raya, ditandai oleh tren peningkatan pada tahun 2023 dan 2024, sementara daerah lain seperti Barito Selatan dan Pulang Pisau cenderung menunjukkan nominal investasi yang rendah dan tidak konsisten.

Adapun pada grafik PMA terlihat bahwa adanya dominasi Kotawaringin Timur sebagai wilayah dengan lonjakan sangat signifikan, terutama pada tahun 2023 yang jauh melampaui daerah lain, sedangkan kabupaten/kota lainnya berada pada level kontribusi yang jauh lebih kecil dan relatif datar. Pola ini menunjukkan bahwa aktivitas investasi pada sektor PKP sangat terkonsentrasi pada wilayah tertentu, dengan ketimpangan

kinerja antardaerah yang cukup mencolok, sehingga potensi pertumbuhan ekonomi sektor ini tidak merata dan didorong oleh kontribusi lokal yang spesifik.

2. Potensi Basis Subsektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (PKP) di Kalimantan Tengah

Pemetaan potensi basis pada subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kalimantan Tengah pada penelitian ini menggunakan tiga alat analisis yakni DLQ, *Shift-Share*, dan MRP. Analisis dilakukan pada 8 subsektor yang dihitung masing-masing menggunakan tiga analisis yang disebutkan sebelumnya. Setelah perhitungan ketiganya selesai, maka akan dilakukan pembobotan untuk melihat hasil akhir subsektor unggulan yang terdapat di Kalimantan Tengah.

Analisis pertama dilakukan menggunakan DLQ dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi dari subsektor PKP di Kalimantan Tengah dengan pertumbuhan ekonomi subsektor PKP di Indonesia. Apabila nilai $DLQ < 1$ maka dapat diartikan bahwasanya subsektor tumbuh lebih lambat dari wilayah acuan, sebaliknya jika nilai $DLQ > 1$ maka dimaknai bahwa subsektor tumbuh lebih cepat dari wilayah acuan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.2. Hasil Analisis DLQ Subsektor PKP di Kalimantan Tengah 2020 – 2024

No	Sektor	DLQ	Interpretasi
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	0,00373	Non-Prospektif

a	Tanaman pangan	0,00266	Non-Prospektif
b	Tanaman Hortikultura	0,00227	Non-Prospektif
c	Tanaman perkebunan	0,00339	Non-Prospektif
d	Peternakan	0,00286	Non-Prospektif
e	Jasa pertanian dan perburuan	0,00371	Non-Prospektif
2	Kehutanan dan penebangan kayu	0,01772	Non-Prospektif
3	Perikanan	0,00264	Non-Prospektif
Total		0,3897	Non-Prospektif

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil perhitungan menunjukkan dengan jelas bahwa seluruh subsektor PKP di Kalimantan Tengah secara total memiliki nilai $0,3897 < 1$ yang berarti seluruh subsektor dikategorikan non-prospektif atau laju pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan pertumbuhan subsektor PKP pada tingkat nasional dalam periode analisis 2020 – 2024. Pun pada masing-masing subsektor, tidak ada pula yang memiliki nilai $DLQ > 1$, yang artinya subsektor tersebut menurut analisis DLQ tumbuh dengan lambat dibanding pertumbuhan pada skala nasional.

Selanjutnya, analisis kedua akan dilakukan dengan menggunakan analisis *Shift-Share*. Analisis ini akan melihat secara objektif dari pengaruh pertumbuhan ekonomi wilayah acuan secara keseluruhan (*national share*), pengaruh struktur pertumbuhan sektor (*industry mix*), serta pengaruh keunggulan kompetitif wilayah (*competitive share*). Analisis *Shift Share* tidak hanya mengidentifikasi tingkat pertumbuhan subsektor, tetapi juga menguraikan faktor penyebabnya, apakah disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi secara umum (N_{ij}), struktur sektoral (M_{ij}), atau keunggulan

kompetitif daerah (C_{ij}). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.3. Hasil Analisis *Shift-Share* Subsektor PKP di Kalimantan Tengah 2020 – 2024

No.	Subsektor	Nij (miliar Rp)	Mij (miliar Rp)	Cij (miliar Rp)	Dij (miliar Rp)
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	1.142,58	(305,02)	1.514,22	2.351,78
A	Tanaman pangan	99,01	(184,61)	59,53	(26,07)
B	Tanaman Hortikultura	27,63	(3,76)	57,46	81,33
C	Tanaman perkebunan	899,73	231,60	854,75	1.986,08
D	Peternakan	85,08	102,75	58,77	246,60
E	Jasa pertanian dan perburuan	31,12	(4,92)	37,65	63,85
2	Kehutanan dan penebangan kayu	54,39	(60,56)	193,54	187,37
3	Perikanan	115,77	168,50	20,11	304,37
Total		2.455,31	(56,03)	2.796,02	5.195,31

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis di atas, terlihat bahwasanya perekonomian subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan selama periode 2020 – 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp5.195,31 miliar. Peningkatan tersebut terlihat dari nilai positif yang dihasilkan oleh sektor PKP dalam kombinasi antara pertumbuhan nasional (N_{ij}), struktur industri (M_{ij}), dan daya saing wilayah (C_{ij}). Angka terbesar dari kombinasi tersebut terletak pada daya saing wilayah (C_{ij}) sebesar Rp2.796,02 miliar, yang artinya pertumbuhan

subsektor PKP di Kalimantan Tengah cenderung ditopang oleh kemampuan daya saing daerahnya (Cij) bukan oleh struktur sektoralnya (Mij).

Analisis berikutnya yang dilakukan untuk menemukan potensi subsektor basis di Kalimantan Tengah ialah menggunakan analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Analisis ini dilakukan guna mengetahui perbandingan laju pertumbuhan sektor dan subsektor di masing-masing wilayah, baik secara provinsi maupun nasional. Ada dua model pada analisis ini, yakni model rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPr) dan rasio pertumbuhan wilayah studi (RPs). Untuk wilayah RPr sendiri adalah Indonesia, sementara wilayah studi ialah Provinsi Kalimantan Tengah.

Model Rasio Pertumbuhan (MRP) merupakan analisis yang dikembangkan dari model *Shift-Share* dimana hasil pertumbuhan yang diperoleh berupa angka koefisien. Kategori angka koefisien ini kemudian dinotasikan dalam bentuk positif (+) dan negatif (-). Untuk $RPr > 1$ dan $RPs > 1$ maka akan dikategorikan positif (+) sementara $RPr < 1$ dan $RPs < 1$ akan dikategorikan negatif (-). Hasil analisis MRP pada penelitian ini kemudian tergambar pada tabel berikut.

Tabel 4.4. Hasil Analisis MRP Subsektor PKP di Kalimantan

Tengah 2020 – 2024

No.	Sektor	Model Rasio Pertumbuhan (MRP)				Interpretasi
		RPr		RPs		
		R	N	R	N	
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	0,73	-	2,81	+	Unggul Wilayah

A	Tanaman pangan	-0,86	-	0,30	-	Lemah
B	Tanaman Hortikultura	0,86	-	3,41	+	Unggul Wilayah
C	Tanaman perkebunan	1,26	+	1,76	+	Unggul
D	Peternakan	2,21	+	1,31	+	Unggul
E	Jasa pertanian dan perburuan	0,84	-	2,44	+	Unggul Wilayah
2	Kehutanan dan penebangan kayu	-0,11	-	-30,39	-	Lemah
3	Perikanan	2,46	+	1,07	+	Unggul

Sumber: Data diolah, 2025

Untuk mengombinasikan hasil RPr dan RPs, maka dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan kegiatan sektor ekonomi pada subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Provinsi Kalimantan Tengah dengan empat klasifikasi:

- a. Klasifikasi 1 dikategorikan pada nilai RPr (+) dan RPs (+) yang mengindikasikan bahwa kegiatan tersebut memiliki pertumbuhan menonjol baik di wilayah referensi maupun wilayah studi. Berdasarkan Tabel 4.4 maka terdapat tiga subsektor yang memenuhi klasifikasi 1 yakni subsektor tanaman perkebunan, peternakan, dan perikanan.
- b. Klasifikasi 2 dikategorikan pada RPr (+) dan RPs (-) yang berarti kegiatan tersebut hanya menonjol aktivitasnya pada wilayah referensi, namun tidak menonjol di wilayah studi. Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwasanya tidak ada subsektor yang memenuhi klasifikasi ini.

- c. Klasifikasi 3 dikategorikan apabila RPr (-) dan RPs (+) yang bermakna kegiatan tersebut pada wilayah referensi tidak menunjukkan pertumbuhan yang menonjol, sebaliknya justru menonjol pada wilayah studi saja. Dengan melihat pada Tabel 4.4 maka diketahui bahwasanya terdapat tiga subsektor yang memenuhi klasifikasi ini yaitu subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian, subsektor tanaman hortikultura, serta subsektor jasa pertanian dan perburuan.
- d. Klasifikasi 4 dikategorikan apabila RPr (-) dan RPs (-) yang menunjukkan bahwa kegiatan subsektor baik pada wilayah referensi maupun wilayah studi tidak menunjukkan pertumbuhan yang menonjol. Berdasarkan Tabel 4.4 maka terdapat dua subsektor yang masuk dalam kategori ini yaitu subsektor tanaman pangan dan serta subsektor kehutanan.

Setelah melakukan ketiga analisis di atas, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembobotan. Pembobotan dilakukan dengan menggabungkan hasil analisis DLQ, *Shift-Share*, dan MRP dengan mengonversinya ke dalam skor komparatif (1–8) serta menjumlahkannya untuk menghasilkan peringkat dengan perspektif yang lebih holistik. Kombinasi ini memungkinkan penentuan yang lebih akurat karena mempertimbangkan pertumbuhan lokal, struktur nasional, serta dinamika kompetitif antar subsektor. Berikut ini adalah hasil pembobotan yang tergambar dalam Tabel 4.5 di bawah ini.

**Tabel 4.5. Hasil Pembobotan Subsektor Basis Pada Sektor PKP
di Kalimantan Tengah 2020 – 2024**

Sektor	DLQ	Nilai	Shift Share (Dij)	Nilai	MRP (RPs)	Nilai	MRP (RPr)	Nilai	Total Nilai	Rank
Pertanian, Pternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	0,00373	7	2.352	8	2,81	7	0,733	3	25	1
Tanaman pangan	0,00266	3	-26	1	0,305	2	-0,865	1	7	8
Tanaman Hortikultura	0,00227	1	81	3	3,408	8	0,864	5	17	6
Tanaman perkebunan	0,00339	5	1.986	7	1,756	5	1,257	6	23	2
Peternakan	0,00286	4	247	5	1,313	4	2,208	7	20	3
Jasa pertanian dan perburuan	0,00371	6	64	2	2,437	6	0,842	4	18	5
Kehutanan dan penebangan kayu	0,01772	8	187	4	-30,39	1	-0,113	2	15	7
Perikanan	0,00264	2	304	6	1,071	3	2,455	8	19	4

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwasanya peringkat tertinggi dalam pembobotan hasil analisis menggunakan DLQ, *Shift-Share*, dan MRP adalah subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian dengan total nilai 25. Poin ini kemudian disusul oleh subsektor tanaman perkebunan sebesar 23, dan peternakan sebesar 20 poin. Tiga subsektor tersebutlah yang menduduki peringkat tertinggi, sementara subsektor kehutanan dengan poin 15 dan subsektor tanaman pangan dengan poin 7 menempati posisi dua terendah. Integrasi ketiga pendekatan ini kemudian telah menghasilkan dasar yang lebih kuat untuk mengidentifikasi subsektor basis yang layak menjadi prioritas pembangunan ekonomi daerah.

3. Tingkat Efisiensi Kinerja Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah

Penelitian ini tidak hanya berhenti pada identifikasi sektor basis, melainkan juga menganalisis tingkat efisiensi kinerja ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah periode 2020 – 2024. Pada penelitian ini, kinerja ekonomi dianalisis menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) menggunakan bantuan *software* MaxDEA dengan menggunakan model BCC (VRS) *input-oriented*. Penelitian dilakukan pada 14 kabupaten/kota dengan menjadikannya DMU atau *Decision Making Unit*, lalu melibatkan tiga variabel input dan satu variabel output. Pemilihan jumlah input, output, serta DMU ini didasarkan oleh perhitungan BCC (VRS) di bawah ini.

$$\text{Jumlah DMU} \geq \max \{m \times s, ms(m + s)\}$$

$$\text{Jumlah DMU} \geq \max \{3 \times 1, 3(3 + 1)\}$$

$$14 \geq \max (3, 12)$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, minimal jumlah DMU yang harus dipenuhi ialah 12 unit. Oleh karenanya, 14 unit DMU berupa kabupaten/kota yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi standar perhitungan yang berlaku. Adapun variabel input yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi investasi PMDN sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kalimantan Tengah 2020 – 2024, realisasi investasi PMA sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kalimantan Tengah 2020 – 2024, serta realisasi belanja daerah Kalimantan Tengah 2020

– 2024. Sementara itu, variabel output yang digunakan adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kalimantan Tengah 2020 – 2024. Pada masing-masing variabel data dikelompokkan dan ditarik nilai rata-rata sebelum diujikan, sehingga data yang dimasukkan ke dalam alat analisis adalah nilai rata-rata selama lima tahun terakhir.

Hasil dari analisis ini kemudian akan memperlihatkan nilai efisiensi teknis dari rasio perbandingan output terhadap input yang telah digunakan secara optimal atau tidak berlebihan. Kabupaten/kota yang memiliki nilai efisiensi sebesar 1 atau 1.000 dapat dikatakan efisien secara teknis, sebaliknya kabupaten/kota yang memiliki nilai kurang dari 1 atau 1.000 dianggap belum efisien dan memerlukan perbaikan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, berikut ini adalah skor efisiensi yang diperoleh oleh masing-masing kabupaten/kota.

**Tabel 4.6. Skor Efisiensi Kinerja Ekonomi Kabupaten/Kota
Kalimantan Tengah 2020 – 2024**

No.	Kabupaten/Kota	Skor Efisiensi
1	Kab. Kotawaringin Barat	1
2	Kab. Kotawaringin Timur	1
3	Kab. Kapuas	1
4	Kab. Barito Selatan	1
5	Kab. Barito Utara	0,655803
6	Kab. Katingan	1
7	Kab. Seruyan	1
8	Kab. Sukamara	1
9	Kab. Lamandau	1
10	Kab. Gunung Mas	0,787433
11	Kab. Pulang Pisau	0,739928
12	Kab. Murung Raya	1
13	Kab. Barito Timur	0,644953

14	Kota Palangkaraya	1
----	-------------------	---

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas diketahui bahwasanya 65% wilayah di Kalimantan Tengah telah menggunakan input secara efisien. Terdapat 10 kabupaten/kota yang memiliki nilai 1 atau telah mencapai titik efisien diantaranya Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Barito Selatan, Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Murung Raya, dan Kota Palangka Raya. Sementara itu 35% wilayah lainnya masih belum mencapai titik efisien dalam penggunaan input untuk menghasilkan output yang diinginkan. Adapun 4 wilayah dari 35% yang dimaksud dalam hal ini ialah Kabupaten Barito Utara, Gunung Mas, Pulang Pisau, dan Barito Timur. Wilayah tersebut diharapkan dapat melakukan perbaikan agar mampu memberikan kontribusi maksimal untuk pembangunan daerah.

Wilayah-wilayah yang tidak efisien, dalam hal ini dapat melakukan perbaikan dengan melihat *benchmark* atau wilayah pembandingan yang direkomendasikan dari alat analisis. *Benchmark* yang dimaksud dalam hal ini adalah wilayah yang memiliki skor efisiensi 1 dan menjadi rujukan terdekat untuk melakukan perbandingan serta perbaikan bagi wilayah inefisiensi. Adanya DMU acuan sejatinya digunakan sebagai penggambaran bagi DMU inefisien dalam mengelola input agar dapat mencapai output yang ideal untuk ditiru. Berikut ini adalah wilayah-wilayah yang dijadikan *benchmark* oleh wilayah inefisien.

**Tabel 4.7. Sebaran Wilayah *Benchmark* Bagi Wilayah Inefisien
di Kalimantan Tengah 2020 – 2024**

No	<i>Decision Making Unit (DMU)</i>	<i>Benchmark</i>	Arah Penyesuaian
1	Kab. Gunung Mas	- Kab. Katingan	25,60%
		- Kab. Seruyan	40,81%
		- Kab. Sukamara	25,81%
		- Kab. Lamandau	7,79%
2	Kab. Pulang Pisau	- Kab. Katingan	39,20%
		- Kab. Seruyan	47,3%
		- Kab. Lamandau	13,5%
3	Kab. Barito Utara	- Kab. Katingan	45,96%
		- Kab. Sukamara	5,97%
		- Kab. Lamandau	8,59%
		- Kab. Murung Raya	39,48%
4	Kab. Barito Timur	- Kab. Kotawaringin Barat	10,8%
		- Kab. Katingan	19,46%
		- Kab. Seruyan	38,42%
		- Kab. Sukamara	41,04%

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwasanya Kabupaten Gunung Mas sebagai salah satu wilayah inefisien memiliki empat kombinasi acuan yang terdiri atas Kabupaten Katingan, Seruyan, Sukamara, dan Lamandau. Masing-masing wilayah mencapai kontribusi 25,60% untuk Katingan, 40,81% untuk Seruyan, 25,81% untuk Sukamara, dan 7,79% untuk Lamandau. Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur produksi sektor PKP Gunung Mas berada paling dekat dengan pola efisien yang dicapai oleh Seruyan sebagai wilayah acuan utama. Kombinasi dari wilayah-wilayah acuan tersebut menjadi panduan untuk Kabupaten Gunung Mas dalam menyesuaikan pola alokasi input dan peningkatan output agar mendekati struktur yang dimiliki oleh daerah *benchmark* tersebut.

Selanjutnya, Kabupaten Pulang Pisau juga menunjukkan kondisi inefisien dan mendapatkan acuan dari tiga DMU efisien, yaitu Katingan, Seruyan, dan Lamandau. Seruyan memberikan kontribusi terbesar dengan bobot 47,30%, diikuti oleh Katingan sebesar 39,20% dan Lamandau sebesar 13,50%. Hal ini mengindikasikan bahwa pola produksi yang dicapai oleh Pulang Pisau relatif mendekati kombinasi antara Seruyan dan Katingan sehingga kedua kabupaten tersebut menjadi referensi penting dalam perbaikan efisiensi. Sementara itu, Kabupaten Barito Utara memiliki empat *benchmark* yang terdiri atas Katingan, Sukamara, Lamandau, dan Murung Raya. Kombinasi bobot yang diberikan adalah 45,96% untuk Katingan, 5,97% untuk Sukamara, 8,59% untuk Lamandau, dan 39,48% untuk Murung Raya. Katingan dan Murung Raya merupakan wilayah acuan utama dengan kontribusi dominan, sedangkan dua *benchmark* lainnya hanya memberikan kontribusi minor. Kondisi ini menandakan bahwa struktur produksi sektor PKP Barito Utara lebih mendekati pola kombinasi dua daerah tersebut, yang secara empiris terbukti efisien dalam mengolah input menjadi output.

Wilayah inefisien selanjutnya adalah Kabupaten Barito Timur yang kemudian memiliki empat *benchmark* yakni Kotawaringin Barat, Katingan, Seruyan, dan Sukamara. Bobot kontribusinya adalah 10,8% untuk Kotawaringin Barat, 19,46% untuk Katingan, 38,42% untuk Seruyan, dan 41,04% untuk Sukamara. Porsi terbesar berasal dari Sukamara dan Seruyan, yang menunjukkan bahwa pola efisiensi kedua daerah tersebut paling dekat

dengan kondisi Barito Timur. Sebaliknya, kontribusi Kotawaringin Barat relatif kecil namun tetap signifikan dalam membentuk *frontier* efisiensi. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi optimalisasi input dan peningkatan output Barito Timur perlu diarahkan agar menyerupai performa subsektor PKP Sukamara dan Seruyan.

Secara keseluruhan, hasil *benchmark* menunjukkan bahwa Kabupaten Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, dan Murung Raya merupakan DMU yang sering muncul sebagai acuan, menandakan bahwa daerah-daerah tersebut memiliki struktur produksi subsektor PKP yang efisien. Sementara itu, kabupaten yang tidak efisien memperoleh rekomendasi arah penyesuaian berdasarkan kombinasi linear dari DMU acuan tersebut. Untuk menghasilkan output yang ada, input yang tersedia dapat dikelola dengan lebih baik, DEA dalam hal ini menawarkan angka solutif sehingga rasio input dan output dapat lebih berkesesuaian. Berikut ini adalah *potential improvement* input yang dapat dilakukan untuk menghasilkan output yang ada saat ini.

Tabel 4.8. *Potential Improvement* Bagi Wilayah Inefisien di Kalimantan Tengah

Wilayah	Realisasi Investasi PMDN PKP (juta Rp)		Realisasi Investasi PMA PKP (juta Rp)		Belanja Daerah (juta Rp)		Total <i>Potential Improvement</i>
	Nilai Riil	Proyeksi	Nilai Riil	Proyeksi	Nilai Riil	Proyeksi	
Gunung Mas	300.944,366	214.735,242	75.761,92	58.332,669	1.003.994	773.022.256	-75%
Pulang Pisau	392.532,974	221.290,271	85.729,336	60.241,751	1.111.752	781.224.847	-103%
Barito Utara	134.169,132	106.091,948	21.971,898	14.704,155	1.298.327	1.026.630	-75%
Barito Timur	280.337,05	171.239,684	78.640,282	20.301,074	954.762	688.926	-141%

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel di atas menerangkan bahwa masing-masing daerah dapat mengurangi input yang dimiliki untuk dikelola lebih baik. Kabupaten Gunung Mas dapat mengurangi 75% input yang dimiliki untuk menghasilkan output PDRB ADHK sejumlah Rp1.341.190.000, sementara Kabupaten Pulang Pisau dapat meminimalkan inputnya sebesar 103% untuk mencapai output PDRB ADHK Rp1.366.490.000. Adapun Kabupaten Barito Utara dapat mengelola inputnya dengan mengurangi sebesar 75% untuk mendapatkan output PDRB ADHK Rp708.874.000.000, sedangkan Kabupaten Barito Timur harus mengurangi input yang dimiliki sebesar 141% untuk menghasilkan output PDRB ADHK Rp1.074.928.000.

Adapun proyeksi *potential improvement* masih belum cukup untuk melihat bagaimana kemudian masing-masing wilayah dapat mencapai nilai efisien. Penyesuaian proporsional yang sudah dilakukan masih tetap membutuhkan eliminasi setelah pergerakan radial, artinya masih ada surplus input yang terkandung dan harus diminimalkan, disinilah kemudian *slack* berfungsi. Kelebihan input yang dimiliki dapat secara spesifik dideteksi, sehingga perbaikan yang dilakukan dapat menciptakan efisiensi yang optimum. Berikut ini adalah nilai *slack* yang dihasilkan masing-masing wilayah inefisien.

Tabel 4.9. *Slack Movement* Pada Wilayah Inefisien di Kalimantan Tengah

Wilayah	<i>Slack Movement</i>			
	Realisasi Investasi PMDN PKP (miliar Rp)	Realisasi Investasi PMA PKP (miliar Rp)	Realisasi Belanja Daerah (miliar Rp)	PDRB ADHK PKP (miliar Rp)
Gunung Mas	- 16.975.995	-	-	-
Pulang Pisau	-54.541.490	-	-	-
Barito Utara	-	-26.697.475	-	-
Barito Timur	-31.426.465	-36.443.261	-	4.287.999

Sumber: Data diolah, 2025

Melihat dari tabel di atas, maka terdapat pola kelebihan input yang berbeda-beda pada setiap wilayah inefisien. Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Pisau menunjukkan kelebihan utama pada proporsi investasi PMDN, sementara wilayah Barito Utara memiliki *slack* pada investasi PMA. Adapun yang paling mencolok dari semua ini adalah Kabupaten Barito Timur, yakni memiliki *slack* pada sisi realisasi investasi PMDN dan PMA, serta memiliki *slack* positif pada sisi PDRB. Angka Rp4.287.999.999 ini merupakan nominal yang seharusnya mampu dicapai oleh Barito Timur dengan memanfaatkan jumlah input yang sama.

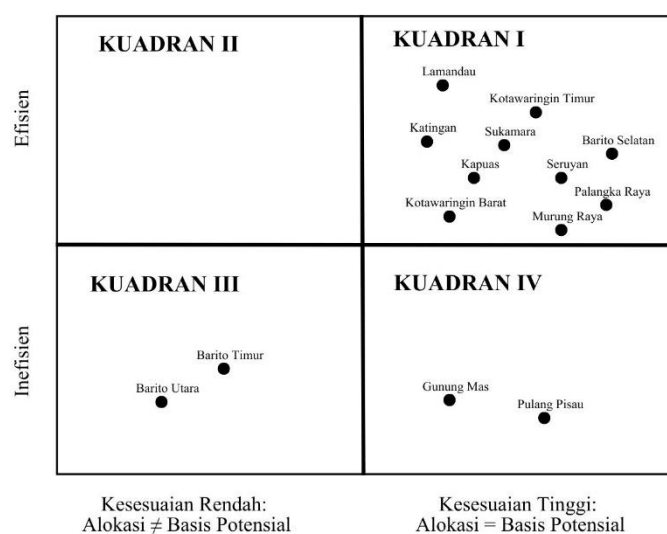
4. Keterkaitan Potensi Basis Subsektor PKP Dengan Tingkat Efisiensi Kinerja Ekonomi Wilayah di Kalimantan Tengah

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan antara potensi basis pada subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kinerja ekonomi di Kalimantan Tengah. Keterkaitan ini kemudian digambarkan dalam bentuk matriks kuadran. Matriks kuadran digunakan sebagai alat klasifikasi dua dimensi yang mengintegrasikan tingkat efisiensi teknis (hasil

DEA) dengan tingkat kesesuaian alokasi investasi terhadap sektor basis PKP. Pendekatan ini sejalan dengan teori ekonomi basis dan pembangunan wilayah, yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi regional akan optimal apabila sumber daya diarahkan pada sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan daya ungkit tinggi terhadap PDRB.

Secara konseptual, pembagian wilayah ke dalam empat kuadran memungkinkan identifikasi yang lebih komprehensif terhadap kondisi pembangunan ekonomi daerah, yaitu wilayah yang telah efisien dan sesuai, wilayah yang efisien namun belum optimal dalam alokasi, wilayah yang tidak efisien dan tidak sesuai, serta wilayah yang memiliki potensi namun belum mampu mengonversi input menjadi output secara maksimal. Hal ini digambarkan dalam matriks berikut.

Gambar 4.3 Matriks Kuadran Keterkaitan Kesesuaian Alokasi Input Sektor PKP dan Efisiensi Kinerja Ekonomi Kalimantan Tengah



Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan gambar di atas, maka diketahui bahwa 10 wilayah yang berada pada Kuadran I menunjukkan kondisi efisien dan memiliki kesesuaian alokasi yang tinggi, yang mengindikasikan bahwa investasi pada sektor PKP telah diarahkan pada sektor basis dan dikelola secara optimal sehingga mampu menghasilkan nilai tambah PDRB yang relatif tinggi. Posisi ini mencerminkan keberhasilan wilayah dalam mengonversi input menjadi output ekonomi secara efektif serta menunjukkan struktur ekonomi regional yang relatif matang dan berdaya saing.

Adapun wilayah yang termasuk dalam Kuadran II merupakan wilayah yang efisien namun memiliki tingkat kesesuaian alokasi yang rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun wilayah mampu mencapai efisiensi teknis dalam pemanfaatan input, alokasi investasi belum sepenuhnya selaras dengan potensi sektor basis PKP. Efisiensi yang dicapai pada kuadran ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain di luar alokasi investasi, seperti keunggulan teknologi, kualitas tenaga kerja, atau adanya pasar khusus, sehingga kinerja ekonomi tetap optimal meskipun struktur alokasinya belum ideal. Pada penelitian ini, tidak ada wilayah yang berada pada Kuadran II.

Sementara itu, pada Kuadran III diisi oleh wilayah Barito Utara dan Barito Timur. Wilayah yang berada dalam kondisi inefisien dengan kesesuaian alokasi yang rendah. Wilayah pada kuadran ini menunjukkan ketidakmampuan dalam mengelola input secara optimal serta lemahnya keterkaitan antara investasi yang disalurkan dengan sektor basis wilayah.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya misalokasi sumber daya yang berpotensi menimbulkan pemborosan input dan rendahnya kontribusi sektor PKP terhadap PDRB regional, sehingga memerlukan perbaikan menyeluruh baik dari sisi efisiensi teknis maupun perencanaan pembangunan sektor.

Selanjutnya, Kuadran IV diisi oleh Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Pisau. wilayah yang berada pada Kuadran IV merupakan wilayah yang inefisien namun memiliki kesesuaian alokasi yang tinggi. Posisi ini menunjukkan bahwa meskipun investasi telah diarahkan pada sektor PKP yang menjadi basis wilayah, pengelolaannya belum mampu menghasilkan output yang maksimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya kendala struktural, seperti keterbatasan infrastruktur pendukung, rendahnya produktivitas tenaga kerja, atau lemahnya tata kelola sektor, sehingga potensi ekonomi yang dimiliki belum dapat dikonversi menjadi pertumbuhan PDRB secara optimal.

Secara keseluruhan, interpretasi matriks kuadran ini menunjukkan bahwa efisiensi teknis dan kesesuaian alokasi merupakan dua dimensi yang saling melengkapi dalam menjelaskan kinerja ekonomi wilayah. Hasil ini menegaskan bahwa peningkatan output PDRB tidak hanya bergantung pada besarnya investasi yang disalurkan, tetapi juga pada ketepatan alokasi dan kemampuan wilayah dalam mengelola sumber daya sesuai dengan potensi sektor basisnya.

B. Pembahasan

1. Potensi Basis Subsektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (PKP) di Kalimantan Tengah

Hasil penelitian ini didapatkan dengan menggunakan metode analisis DLQ, *Shift-Share*, dan MRP. DLQ digunakan untuk menilai dinamika pertumbuhan relatif pada masing-masing subsektor PKP, sementara *Shift-Share* digunakan untuk mengidentifikasi daya saing regional dan MRP ditujukan untuk mengukur keunggulan pertumbuhan masing-masing subsektor baik secara regional maupun nasional. Melalui analisis tersebut, terdapat pola perkembangan pada subsektor PKP yang muncul secara konsisten dan relevan dengan berbagai teori yang dikaitkan pada penelitian ini.

Analisis pertama dilakukan dengan perhitungan DLQ yang menunjukkan bahwa keseluruhan subsektor pada sektor PKP di Kalimantan Tengah periode 2020 – 2024 dinyatakan non-prospektif atau laju pertumbuhannya berjalan dengan lambat. Jika dilihat pada Tabel 4.2, meskipun subsektor kehutanan memiliki nilai DLQ paling baik diantara yang lainnya yakni 0,01772 namun angka ini masih cukup jauh dari kategori prospektif. Adapun subsektor pertanian dan perkebunan juga menunjukkan nilai DLQ yang sangat rendah dengan nilai masing-masing 0,00373 untuk sektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian serta 0,00339 untuk perkebunan.

Padahal jika ditelisik lebih jauh, kedua subsektor ini merupakan kontributor besar dalam PDRB Kalimantan Tengah. Temuan ini

memperkuat bahwa tingginya kontribusi terhadap PDRB tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan yang kompetitif. Sehingga, subsektor PKP di Kalimantan Tengah menurut analisis DLQ kemudian dinilai tidak cukup kuat untuk mendorong ekspansi ekonomi daerah secara dinamis. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mandatari dkk. (2020) bahwasanya pada mayoritas subsektor di beberapa kabupaten/kota akan sulit berdaya saing dan cenderung tumbuh dalam keadaan yang lambat atau bahkan tertinggal.

Kendati demikian, penelitian ini tidak hanya mengandalkan satu alat analisis saja dalam menentukan sektor unggulan di Kalimantan Tengah. Berbeda dengan hasil DLQ yang menunjukkan bahwa keseluruhan subsektor bersifat non-prospektif, hasil analisis menggunakan *Shift-Share* pada Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian memberikan kontribusi perubahan terbesar yakni Rp2.351,78 miliar, yang mana hal ini menggambarkan dominasinya dalam struktur ekonomi sektor PKP. Kontribusi tersebut menjadi penanda bahwa subsektor ini memiliki kekuatan yang kompetitif dan signifikan di tingkat regional, mengingat angka yang disumbangkannya mencapai Rp1.514,22 miliar meskipun secara struktur sektoral dan nasional pertumbuhannya tidak secepat sektor lain.

Selain itu, nampak bahwa subsektor tanaman perkebunan menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan PKP menurut analisis *Shift-Share*, hal ini ditandai oleh perubahan sebesar Rp1.986,08 miliar baik di tingkat nasional, sektoral maupun regional, subsektor ini dikategorikan kompetitif

dan bertumbuh dengan cepat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Priyatna dkk. (2022) bahwa subsektor tanaman perkebunan mendominasi bahkan memiliki keunggulan kompetitif diantara seluruh provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Tak hanya subsektor tersebut, subsektor perikanan juga nampak memberikan kontribusi signifikan yang dapat terlihat dari perubahan total sejumlah Rp304,37 miliar dalam lima tahun terakhir. Transisi yang selalu menunjukkan angka positif baik secara nasional, sektoral, maupun regional menjadikan sektor ini memiliki indikasi positif untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Sebaliknya, subsektor tanaman pangan menunjukkan kondisi yang kurang menguntungkan dengan total perubahan negatif sebesar -Rp26,07 miliar dan menjadi satu-satunya subsektor yang bernilai minus secara keseluruhan dibanding subsektor lainnya. Ini menandakan bahwa subsektor tanaman pangan tidak memiliki daya saing yang kuat dan berada dalam industri yang tumbuh lambat.

Hal ini kemudian diperkuat melalui analisis Metode Rasio Pertumbuhan (MRP), hasil perhitungan menunjukkan bahwa subsektor yang tergolong unggul di Kalimantan Tengah adalah tanaman perkebunan dengan nilai RPr sebesar 1,257 dan RPs sebesar 1,756; peternakan dengan nilai RPr sebesar 2,208 dan RPs sejumlah 1,313; serta subsektor perikanan dengan nilai RPr 2,455 dan RPs sebesar 1,071. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dominasi dari subsektor tersebut, sementara subsektor lainnya memerlukan intervensi strategis untuk meningkatkan

kontribusinya dalam pertumbuhan daerah. Terbukti dari subsektor tanaman hortikultura serta jasa pertanian dan perburuan yang hanya mampu unggul secara wilayah, namun masih belum dapat bersaing secara nasional.

Sementara itu, subsektor tanaman pangan serta kehutanan dikategorikan lemah, sehingga membutuhkan perhatian khusus untuk diberdayakan. Padahal, secara analisis DLQ subsektor kehutanan memiliki performa yang lebih baik dibanding yang lain, menunjukkan bahwa meskipun angka yang disumbangkan terhadap PDRB, sektor ini cenderung berjalan dengan stagnan. Adapun subsektor tanaman pangan yang menempati posisi tidak unggul berdasarkan tiga alat analisis tersebut telah memperlihatkan tantangan struktural yang mendalam, hal ini ditandai dengan adanya kemerosotan yang signifikan serta minimnya kontribusi yang diberikan dalam peningkatan nilai PDRB daerah.

Sehingga, berdasarkan keseluruhan hasil analisis dan setelah dilakukan pembobotan yang menghasilkan peringkat sebagaimana tertera dalam Tabel 4.5, diketahui bahwasanya subsektor potensial yang terdapat di Kalimantan Tengah adalah: (1) subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian khususnya tanaman perkebunan dan peternakan, serta (2) subsektor perikanan. Temuan potensi subsektor perikanan dalam penelitian ini juga berkesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2023) bahwa subsektor tersebut diperkirakan dapat menghasilkan 85% pendapatan primer berdasarkan output lapangan usaha baik dalam bentuk upah dan gaji bagi pekerja, pajak bagi pemerintah, serta surplus usaha bagi

perusahaan. Subsektor ini juga dinilai akan memberikan dampak paling besar mengingat angka pengganda Nilai Tambah Bruto (NTB) yang dipegang mencapai angka 0,9858 yang artinya setiap permintaan akhir perikanan sebesar Rp1.000, akan meningkatkan NTB total Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp985,8.

Sementara itu, tanaman pangan justru menduduki posisi terakhir dan menjadi subsektor paling lemah untuk dikembangkan berdasarkan perspektif ekonomi. Sehingga dapat dilihat bahwasanya suatu subsektor dikategorikan sebagai subsektor basis bukan hanya karena memiliki pertumbuhan yang relatif kuat, namun juga memiliki daya saing serta keunggulan pertumbuhan baik secara nasional maupun wilayah. Hal ini mendukung teori yang disampaikan oleh Sambodo (2002) dalam Usya (2006) dikutip dari tulisan (Ridwan & Saprudin, 2024) bahwa syarat suatu sektor dikatakan sektor basis adalah memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang besar, memiliki keterkaitan antar sesama sektor yang tinggi baik di masa depan maupun di masa lalu, serta adanya kemampuan menciptakan nilai tambah yang tinggi.

Dengan demikian, subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian khususnya tanaman perkebunan dan peternakan, serta subsektor perikanan merupakan subsektor unggulan yang layak untuk dikembangkan potensinya dalam mendorong laju perekonomian di Kalimantan Tengah.

2. **Tingkat Efisiensi Kinerja Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah**

Penilaian efisiensi kinerja ekonomi di Kalimantan Tengah pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis *Data Envelopment Analysis* (DEA). Penggunaan alat analisis ini akan menunjukkan seberapa mampu suatu wilayah dalam mengelola input untuk menghasilkan output tertentu. Dalam hal ini, input yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi wilayah masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Tengah ialah realisasi investasi PMDN dan PMA pada sektor PKP serta realisasi belanja daerah. Adapun output yang diujikan ialah PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada sektor PKP selama lima tahun berturut-turut.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.6, ditemukan bahwa terdapat 10 kabupaten/kota yang mencapai skala efisiensi 1 atau telah mampu mengelola input yang dimiliki secara optimal untuk menghasilkan output yang ada secara relatif. Adapun kabupaten/kota yang tidak efisien atau memiliki skor efisien < 1 diantaranya adalah Kabupaten Gunung Mas, Pulang Pisau, Barito Utara dan Barito Timur. Keempat wilayah inefisien di atas menjadi bukti bahwa besarnya angka investasi yang diterima serta realisasi belanja daerah pada kenyataannya tidak cukup mampu untuk menghasilkan PDRB yang berkesesuaian. Padahal, dalam penelitian Fatihudin (2019) ia menjelaskan bahwa pertumbuhan PDRB dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, yang mana ini merupakan implikasi dari adanya kenaikan produksi barang dan jasa. Sehingga, jika hal ini terealisasi dengan baik, maka suatu daerah dapat mengoptimalkan

pembangunan sektor-sektor basis melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi.

Kendati demikian, berdasarkan temuan penelitian ini, posisi Kalimantan Tengah dalam mengelola input yang dimiliki dapat dikatakan cukup baik, hal ini dibuktikan oleh 65% kabupaten/kota yang telah mencapai tingkat efisien untuk menghasilkan output. Jika dibandingkan dengan penelitian Rahmadi & Penangsang (2024) yang dilakukan di Jawa Timur, pada wilayah tersebut hanya ada lima kabupaten/kota yang dapat dikatakan efisien di antara 38 wilayah administratif pada provinsi tersebut. Dikutip dari penelitian Raharjo & Kusnadi (2023) performa yang cukup baik dari Kalimantan Tengah juga didukung oleh adanya pertumbuhan industri agro sebagai industri hilir dari sektor PKP. Investasi pada kedua sektor yang saling berkaitan ini menjadi penunjang dalam peningkatan output regional serta pendapatan rumah tangga.

Adapun pada wilayah-wilayah yang masih belum efisien seperti Gunung Mas, Pulang Pisau, Barito Utara, dan Barito Timur memerlukan penyesuaian dalam penggunaan input yang tersedia agar dapat menghasilkan output maksimum. Sebagaimana pada Tabel 4.8 yang memperlihatkan bahwa masing-masing wilayah inefisien dapat mengurangi input mereka untuk menghasilkan nilai PDRB saat ini ataupun memaksimalkan input yang ada agar dapat meningkatkan PDRB wilayah tersebut. Namun, khusus untuk wilayah Barito Timur fokus perbaikannya bukan lagi pada ranah efektivitas dan distribusi investasinya,

melainkan evaluasi menyeluruh pada setiap aktivitas investasi di sektor PKP. Hal ini disebabkan wilayah tersebut memerlukan pengurangan input secara ekstrem yakni sebesar 141%. Hal ini juga didukung oleh analisis pada Tabel 4.9 yang memperlihatkan bahwa posisi Barito Timur secara spesifik memang harus meminimalisir input dari sisi investasi baik PMDN maupun PMA pada sektor PKP. Selain itu, wilayah ini juga harus menaikkan outputnya hingga Rp428,8 miliar agar dapat mencapai titik efisien.

Temuan pada Tabel 4.9 juga menunjukkan bahwa problematika pada masing-masing wilayah inefisien didominasi oleh pola kelebihan input investasi PMDN dan PMA sektor PKP yang kurang produktif di masing-masing wilayah. Jika dianalisis lebih jauh, pada Gambar 4.2 terlihat adanya tren kenaikan dalam input yang diterima oleh masing-masing wilayah inefisien dari tahun ke tahun, namun pengelolaannya yang tidak cukup mumpuni sehingga menyebabkan output pada sektor PKP tidak mencapai titik optimal. Padahal, wilayah seperti Gunung Mas dan Pulang Pisau merupakan wilayah dengan sektor PKP sebagai komoditas basis utama, berbanding terbalik dengan wilayah Barito Utara dan Barito Timur yang komoditas unggulannya merupakan pertambangan dan penggalian. Namun, investasi baik pada sisi PMDN maupun PMA justru menampilkan tren kenaikan investasi di kedua wilayah yang tidak potensial pada sektor PKP.

Adanya tren kenaikan investasi tersebut menjadi tanda tanya yang cukup besar soal mengapa investasi digelontorkan pada sektor non basis di wilayah seperti Barito Utara dan Barito Timur, sementara pada wilayah

potensial seperti Gunung Mas dan Pulang Pisau, investasi justru bergerak dengan cukup stagnan. Ketimpangan pola investasi ini mengindikasikan bahwa alokasi modal tidak sepenuhnya mempertimbangkan struktur ekonomi basis daerah, sehingga berpotensi menurunkan tingkat efektivitas dan efisiensi pemanfaatan input yang diukur melalui DEA. Dengan kata lain, peningkatan investasi tidak secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan efisiensi apabila tidak diarahkan pada subsektor yang memiliki kemampuan untuk mengonversi input menjadi output secara optimal.

Fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui temuan *input slack* pada Tabel 4.9 yang menunjukkan bahwa sebagian input di wilayah-wilayah tidak efisien tidak dimanfaatkan secara maksimal sehingga tidak menghasilkan peningkatan output yang sepadan. Dalam konteks Gunung Mas dan Pulang Pisau, tingginya *slack input* menandakan bahwa meskipun sektor PKP merupakan sektor basis, kapasitas kelembagaan, teknologi, serta kualitas infrastruktur produksi belum cukup kuat untuk mendorong peningkatan output sesuai potensi yang sebenarnya. Sementara itu, pada wilayah Barito Utara dan Barito Timur, tingginya investasi justru berpotensi tidak berdampak signifikan karena sektor PKP bukan merupakan sektor unggulan, sehingga input tambahan cenderung tidak menghasilkan output yang efisien.

Dengan demikian, tingkat efisiensi kinerja ekonomi kabupaten/kota di Kalimantan Tengah dalam mengelola investasi dan belanja daerah terhadap PDRB sektor PKP ternyata sangat dipengaruhi oleh keselarasan (*alignment*)

antara alokasi input dengan struktur ekonomi basis wilayah. Hal ini sejalan dengan teori Harrod Domar (1940) dalam (Liana dkk., 2024) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi dalam pembentukan modal, sehingga modal yang tersedia haruslah digunakan secara efektif. Melalui pembentukan modal inilah, pertumbuhan ekonomi kemudian akan berlangsung dengan baik seiring dengan adanya penambahan output dari pengelolaan modal dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Misalokasi investasi yang terjadi pada kasus ini kemudian menjadi berkesesuaian dengan teori tersebut, di mana penyaluran modal yang tidak efektif akan menghambat pertumbuhan PDRB ADHK di sektor PKP.

Implikasi kebijakannya menjadi jelas, bahwa kebijakan fiskal dan investasi daerah akan jauh lebih efisien jika diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor yang telah teridentifikasi memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Dalam konteks ini, wilayah-wilayah *benchmark* seperti Katingan, Seruyan, Sukamara, dan lainnya tidak hanya menjadi acuan statistik namun menjadi model praktik bagi kabupaten tidak efisien untuk menata ulang pengelolaan inputnya. Sehingga, untuk mengubah wilayah tersebut menjadi efisien diperlukan keselarasan antara strategi investasi dengan sektor basis, serta mempelajari dari praktik terbaik wilayah-wilayah yang telah efisien.

3. Keterkaitan Antara Potensi Basis Subsektor PKP Dengan Tingkat Efisiensi Kinerja Ekonomi Wilayah di Kalimantan Tengah

Hasil analisis penelitian ini mengungkapkan bahwa tidak ada yang kebetulan dalam identifikasi sektor basis dan tingkat efisiensi kinerja ekonomi wilayah. Terdapat kesinambungan yang logis dan kuat antara keduanya. Secara umum, wilayah-wilayah yang ekonominya selaras dengan struktur sektor basis PKP yang potensial cenderung mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketidakselarasan antara alokasi sumber daya dengan keunggulan komparatif wilayah menjadi akar inefisiensi.

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, maka terdapat pola yang saling terikat antara keduanya. Pertama, pola keterkaitan positif terlihat pada kabupaten/kota yang telah mencapai skor efisien atau 1 seperti Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan, Kapuas, Sukamara, Lamandau dan Katingan, daerah-daerah ini kemudian muncul sebagai *benchmark*. Hal ini tidak terjadi begitu saja, mengingat wilayah-wilayah di atas merupakan daerah yang memiliki subsektor unggulan berupa tanaman perkebunan dan perikanan. Dikutip dari DPMPTSP Kalimantan Tengah (2024) bahwasanya per tahun 2019 – 2023 sektor PKP menjadi sektor basis di wilayah-wilayah tersebut dengan lokasi pengembangan paling pesat berada di Kabupaten Seruyan. Dengan kata lain, efisiensi yang didapatkan oleh wilayah-wilayah tersebut juga disebabkan oleh kemampuan dalam

mengonversi investasi dan belanja menjadi PDRB yang memiliki kapasitas untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi.

Kedua, pola keterkaitan negatif yang tercipta pada wilayah inefisien justru memperkuat alasan mengapa wilayah tersebut gagal mencapai efisiensi. Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Pisau merupakan daerah yang berhasil menjadikan sektor PKP sebagai basis ekonomi utama, namun nilai yang muncul pada analisis *slack* dan *proportional improvement* menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara potensi basis dengan penyerapan investasi. Hal ini bisa terjadi akibat lemahnya kapasitas kelembagaan, teknologi, ataupun infrastruktur pendukung sehingga potensi basis yang telah disokong modal tidak mampu menghasilkan output yang optimal. Temuan ini sejalan dengan teori Solow-Swan yang menyatakan bahwa pertumbuhan output per kapita hanya dapat dipertahankan melalui kemajuan teknologi yang terus menerus. Oleh karena itu, inovasi dan peningkatan efisiensi teknologi menjadi kunci utama dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Adisasmita, 2012).

Sementara itu, pada Kabupaten Barito Utara dan Barito Timur berdasarkan hasil penelitian ini telah terjadi misalokasi investasi. Komoditas unggulan di kedua wilayah ini adalah sektor pertambangan dan penggalan, bukan sektor PKP. Bahkan dikutip dari DPMPTSP Kalimantan Tengah (2024) sektor PKP di kedua wilayah ini berdasarkan analisis LQ nilainya < 1 . Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara struktur

ekonomi basis yang dimiliki dengan tren kenaikan investasi PMDN dan PMA pada sektor PKP di kedua wilayah ini. Alhasil, inefisiensi ekstrem hingga memerlukan pengurangan input sebesar 141% ataupun kenaikan output PDRB ADHK sebesar Rp4,28 miliar menjadi penanda kuat bahwa sumber daya yang disalurkan ke sektor non-basis akan sulit untuk dikonversi secara efektif menjadi PDRB. Temuan ini kemudian relevan dengan pernyataan Parker (2022) bahwa PDRB bukan hanya tolak ukur secara kuantitatif, tetapi juga sarana untuk mengevaluasi kualitas pertumbuhan ekonomi regional.

Selain itu, temuan dari provinsi tetangga seperti Kalimantan Selatan juga memberikan perspektif komparatif yang relevan. Studi oleh Asyahri & Syafril (2018) menunjukkan bahwa penetapan kawasan andalan berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2000 tidak sepenuhnya sesuai dengan hasil analisis ekonomi wilayah, di mana beberapa kabupaten yang ditetapkan sebagai kawasan andalan justru masuk dalam kategori daerah tertinggal (Kuadran III) berdasarkan analisis Tipologi Klassen. Hal ini menguatkan temuan penelitian ini bahwa kebijakan pembangunan wilayah harus didasarkan pada identifikasi sektor basis dan analisis efisiensi yang akurat, bukan hanya pertimbangan politis atau geografis semata. Ketimpangan investasi dan ketidakselarasan alokasi sumber daya yang ditemukan di Kalimantan Tengah juga tercermin dalam studi di Kalimantan Selatan, di mana kesenjangan antardaerah justru meningkat akibat kebijakan yang tidak berbasis data.

Selain adanya misalokasi investasi dan kelemahan dalam pengelolaan input yang dimiliki, keadaan juga diperparah oleh diskoneksi antara input dengan jenis subsektor PKP yang tepat. Aliran dana justru banyak diarahkan ke subsektor yang secara struktural lemah, yakni tanaman pangan dan kehutanan. Padahal, hasil analisis pada penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa kedua subsektor ini tidak kompetitif dan tumbuh dengan lambat.

Ironisnya, ketidakunggulan subsektor tanaman pangan ini justru berkontradiksi dengan kebijakan besar seperti program *Food Estate*. Melihat dari temuan pada penelitian ini dan kaitannya dengan program *Food Estate*, maka diketahui bahwa terdapat ketidaksinambungan dengan fakta di lapangan. Tanaman pangan yang diancang-ancang sebagai pendongkrak perekonomian nyatanya justru memiliki peringkat paling rendah dalam analisis sektor unggulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Husnatarina dkk. (2025) diketahui bahwa salah satu kendala terbesar dari program ini adalah keterbatasan akses pasar besar dan kompetitif. Seringkali, para petani hanya mampu menjual secara murah kepada tengkulak sementara harga pasaran justru jauh lebih tinggi dari harga awal yang diberikan kepada petani.

Hal ini menyebabkan kerugian yang cukup besar, sehingga rantai pasok yang ada dianggap belum memberikan nilai tambah yang optimal dan berkeadilan. Akibatnya, input yang besar melalui program ini tidak dikonversi secara optimal menjadi output ekonomi (PDRB) yang tinggi.

Adapun, kecurangan yang dihadapi oleh para petani tidak berkesesuaian dengan teori pembangunan ekonomi Islam yang mengedepankan etika bisnis yang berkeadilan dan transparan sebagaimana dipaparkan oleh Siddiqi dalam (Zaman, 2009). Praktik ini pun telah dilarang oleh Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 188 sebagai berikut.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Tidak hanya itu, hambatan program ini juga terletak pada kurangnya insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk keberlanjutan program membuat para petani kesulitan untuk mengembangkan produktivitas pertanian mereka. Belum lagi adanya keterbatasan ilmu dari para petani juga menjadi salah satu tantangan akan keberlangsungan program ini. Padahal, per tahun 2023 kebutuhan beras di Kalimantan Tengah mencapai 225.250 ton namun produksi yang dapat dilakukan hanya sekitar 198.853,18 ton (DPMPTSP Kalimantan Tengah, 2024). Oleh karenanya, dengan keberadaan program *Food Estate* subsektor tanaman pangan seharusnya mampu menjadi subsektor basis, namun kenyataannya justru tidak berkesesuaian.

Adapun eksistensi subsektor kehutanan yang tidak menjadi subsektor basis menunjukkan pola berbeda dalam penelitian ini. Analisis DLQ menunjukkan pertumbuhan relatif yang lebih baik meski tetap non-prospektif, sementara MRP mengategorikannya lemah. Pola ini mengindikasikan stagnasi, yakni sektor ini masih menyumbang ke PDRB (*base effect* besar) tetapi tidak memiliki dinamika pertumbuhan ke depan. Subsektor ini nampaknya telah mencapai titik jenuh sehingga alokasi investasi tidak lagi menghasilkan peningkatan output yang signifikan. Oleh karena itu, secara ekonomi, statusnya yang tidak potensial sebagai sektor basis merupakan temuan yang logis.

Selain itu, potensi subsektor kehutanan beberapa tahun belakangan telah dilemahkan oleh regulasi pemerintah melalui larangan pembukaan lahan dengan metode pembakaran. Hal ini termuat dalam Pasal 69 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga masyarakat mengubah cara pembukaan lahan mereka menjadi manual namun dengan risiko memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya (Isah dkk., 2023). Pembatasan tersebut merupakan langkah yang adil untuk dilakukan, mengingat angka deforestasi yang semakin hari semakin meningkat dan dikhawatirkan akan merusak ekosistem hutan serta rawan akan bencana alam. Selain itu, aktivitas manusia termasuk dalam urusan ekonomi secara Islam tetap harus berpegang pada unsur keberlanjutan, hal ini sejalan dengan temuan Asutay (2007) yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak boleh menimbulkan ketimpangan

sosial atau kerusakan lingkungan, karena keduanya bertentangan dengan prinsip keadilan.

Dengan demikian, keterkaitan antara potensi basis dan kinerja ekonomi wilayah bersifat kausal dan timbal balik. Sektor basis menciptakan landasan untuk mencapai efisiensi dengan memberikan produktivitas marginal input yang tinggi. Sebaliknya, alokasi input yang efisien dengan memfokuskan pada sektor basis akan memperkuat serta mengakselerasi pertumbuhan sektor basis itu sendiri. Temuan dalam penelitian ini kemudian memberikan bukti empiris bahwa pertumbuhan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada keunggulan sektor basis ekspor dan kemajuan teknologi yang meningkatkan produktivitas subsektor unggulan.

Oleh karenanya, tingkat efisiensi kinerja ekonomi wilayah dalam konteks ini bukan sekadar fungsi dari besaran input atau ketatnya pengawasan, melainkan mengutamakan fungsi dari kesesuaian antara komposisi input dengan peta potensi ekonomi basis wilayah. Hubungan ini menjelaskan mengapa beberapa wilayah sukses menjadi efisien dan layak ditiru (*benchmark*), sementara yang lain stagnan dalam inefisiensi. Sehingga, implikasi kebijakan yang dapat dilakukan ialah dengan pemetaan sektor basis yang akurat agar mampu meningkatkan efisiensi kinerja ekonomi wilayah, serta diikuti dengan penyaluran sumber daya yang disiplin dan strategis untuk membangun keunggulan kompetitif dari sektor-sektor basis.